

## DAFTAR RUU YANG AKAN DIBAHAS PADA MASA SIDANG I TAHUN 2003-2004

NO.	KOMISI/ PANSUS	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG	USUL DARI	MULAI DIBAHAS	KETERANGAN
	<b>KOMISI I</b>				
	<b>KOMISI II</b>	Pembentukan 21 Kabupaten/ kota : Halmahera Barat (Maluku Utara); Minahasa Utara, kota Kotamobagu (Sulawesi Utara); Tojo Unauna (Sulawesi Tengah); Bombana, Kolaka Utara, Wakatobi (Sulawesi Tenggara); Serdang Jaya, Samosir, Batubara (Sumatra Utara); Dhamas Raya (Sumatra Barat); OKU Selatan, OKU Utara, OKU Timur, Ogan Ilir (Sumatra Selatan); Sumbawa Barat (NTB); Sumba Tengah(NTT); Dobo (Maluku); Sekadau (Kalimantan Barat); Seram Barat, Seram Bagian Timur (Maluku);	DPR RI / Komisi II		Sejumlah 38 Kabupaten/Kota diusulkan DPR, 17 Kab/Kota disahkan menjadi UU termasuk dalam 10 RUU Kabupaten /kota) yang dia pemerintah, sisa 21 kab/Kota.
1		Tatacara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR RI/ Baleg	14 Juni 2001	Sedang dibahas oleh panja
2		Perlindungan Saksi dan Korban	DPR RI/ Baleg	24 Sept 2002	Menunggu koreksi kom. II
3		Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;	DPR RI/ Baleg	10 Sept 2002	Menunggu koreksi kom. II
4		Ombudsman	DPR RI/ Baleg	21 Jan 2003	Menunggu koreksi kom. II
5		<b>Perubahan atas UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang</b>	Pem/ Menkeh Ham	24 juni 2003	
6	<b>KOMISI III</b>	Perikanan	<b>DPR RI / Komisi III</b>	17 Sept 2002	Dikirim ke Pres 9 juli 2003
7		perkebunan	<b>DPR RI / Komisi III</b>	24 Sept 2002	Dikirim ke Pres 7 Maret 2003
8	<b>KOMISI IV</b>	1. Sumber Daya Air	Pem/Dep. Kimpraswil	28 Okt 2001	Sedang dibahas.
9		2. Perposan	<b>DPR RI /</b>	19 Nov 2002	Menunggu koreksi kom IV

			<b>Komisi IV</b>		
10	<b>KOMISI V</b>	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	DPR RI/ Anggota	4 Sept 2002	Dikirim ke Pres : 20 Jan 2003
11	<b>KOMISI VI</b>	Keolahragaan;	DPR RI/ Komisi VI	21 Maret 2002	Dikirim ke Pres : 27 Sept 2002
12	<b>KOMISI VII</b>	1. Praktek Kedokteran ;	DPR RI/ Komisi VII	21 Jan 2002	Dikirim ke Pres : 13 Maret 2002
13		2. Perlindungan Pekerja Indonesia dan Luar Negeri	DPR RI/ Baleg	18 Nov 2002	Dikirim ke Pres : 27 Mei 2003
14		3. Anti Kekerasan Dalam Rumah Tngga	DPR RI/ Baleg	13 Mei 2003	Dikirim ke Pres : 27 mei 2003
15		4. Asuransi Kesehatan Sosial Nasional	DPR RI/ Komisi VII	27 Mei 2003	Menunggu koreksi kom VII
16	<b>KOMISI VII</b>	Panas Bumi	DPR RI Komisi VIII	15 Juli 2002	Sedang dibahas
17	<b>KOMISI IX</b>	1. Likuidasi Bank	DPR RI/ Baleg	11 Juli 2002	Menunggu koreksi kom.IX
18		2. Perkreditan Perbankan;	DPR RI/ Baleg	Sept 2001	Dikirim ke Pres : 9 Jan 2002
19		3. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Pem/Dep Keh HAM	28 Mei 2002	Sedang dibahas
20		4. Otoritas Jasa Keuangan.	Pem/Dep Keu	27 Mei 2003	
21		5. Perubahab atas UU No. 2/1992 tentang Usaha perasuransian	Pem/Dep Keu	27 Mei 2003	
22		6. Perubahan Kedua atas UU no. 7/1992 tentang Perbankan	Pem/Dep Keu	27 Mei 2003	
23		7. Perubahan atas UU No. 11/1992 tentang Pensiun	Pem/Dep Keu	27 Mei 2003	
24		8. Perubahan atas UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal	Pem/Dep Keu	27 Mei 2003	

25	<b>BADAN LEGISLASI</b>	1. Perubahan UU No. 14/1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman	DPR RI/ Baleg	24 Sept 2002	Sedang dibahas
26		2. Perubahan UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung			
27		3. Perubahan UU No. 5/1986 tentang Peradilan TUN			
28		4. Perubahan UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum			
29		5. Perubahan UU No. 5/1991 tentang Kejaksaan RI			
30		6. Kejaksaan RI	Pem/Kejagung	24 Sept 2002	
31		7. Komisi Yudisial	DPR RI/ Baleg	21 Jan 2003	Dikirim ke Pres : 16 Juni 20
32	<b>PANSUS</b>	1. Perubahan UU No.34/1999 tentang DKI RI, Jakarta (1)	DPR RI/ Baleg	23 Sept 2003	Menunggu koreksi Pansus
33		2. perubahan UU 23/1999 tentang Bank Indonesia(2)	Pem/Dep Keu	Nov 2001	Sedang dibahas
34		3. Pemeriksaan Tanggung-jawab Keuangan Negara (3)	Pem/Dep Keu	Okt 2001	
35		4. Penyelesaian Perselisihan Industrial(4)	Pem/Dep Nakertrans	Juni 2000	Sedang dibahas
36		5. Lembaga Kepresidenan (5)	DPR RI/ Baleg	Juni 2001	Dikirim ke Pres 6-12-01; 8-14-02
37		6. Kebebasan memperoleh Informasi Publik (6)	DPR RI/ Baleg	Nov 2001	Menunggu koreksi Pansus
38		7. Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (7)	DPR RI / Komisi II	12 Nov 2002	Dikirim ke Pres 5 Feb 200
39		8. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (8)	Pem/Dep Keh HAM	18 Nov 2002	Suatu Paket
40		9. Pemberlakuan UU No.../2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (8)	Pem/Dep Keh HAM	18 Nov 2002	
41		10.Perubahan UU No. 16/2001 tentang Yayasan (9)	Pemerintah		Sedang dibahas
42		11.Rahasia Negara (10)	Baleg /DPR		Menunggu RUU KMI Publik
43		12.Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (11)			

44		Perubahan UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemb. Tindak Pidana Korupsi	Baleg /DPR		Belum ada tanggapan fraksi
45		Perubahan atas UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Baleg /DPR		
	Jumlah	29 RUU dari DPR (ditambah RUU tentang pembentukan 21 Kab/Kota) ; dan 16 RUU dari Pemerintah			
Non RUU					
1	Pansus	Kasus BLBI (12)	DPR		
2	Pansus	Kasus Pertahanan secara Nasional (13)	DPR		